



Toolkit for Parliamentarians



Acknowledgement

This is an informal translation of the IPPFoRB's Toolkits for Parliamentarians. All reasonable efforts have been made to ensure this is an accurate translation. This version is a translation of the original document in English and shall serve as information purposes only. In the case of a discrepancy, the English original shall prevail.

The translation of this document from English into Indonesian was jointly commissioned by the following organisations.



International Panel of
Parliamentarians
for Freedom of Religion
or Belief

Mengembangkan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan:

Panduan untuk Anggota Parlemen¹

Cara Menggunakan Panduan ini

Panduan didesain untuk membantu anggota parlemen dalam rangka mengadvokasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) secara lebih efektif, melalui peningkatan pemahaman terhadap KBB beserta sejumlah mekanisme yang ada di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak atas KBB ini.

Hari KBB internasional setiap tahun diperingati pada 27 Oktober. Anda bisa menggunakan panduan ini untuk menyeleksi sejumlah aksi dalam mendukung KBB pada tanggal tersebut atau justru sepanjang tahun.

Beberapa aksi yang dianjurkan untuk memperingati Hari KBB Internasional termasuk:

- Mengajukan pertanyaan ke badan legislatif negeri anda (DPR);
- Menggelar debat di badan legislatif;

- Meningkatkan kesadaran di media sosial;
- Menulis artikel di media terkait pentingnya KBB, atau meningkatkan
- kesadaran atas pelanggaran-pelanggaran tertentu;

Aksi-aksi di atas disoroti dan dijelaskan lebih lanjut di bagian isi panduan ini dan diringkas di bagian kesimpulan.

Adapun sejumlah aksi untuk mempromosikan KBB dalam jangka panjang di antaranya termasuk:

- Menggunakan berbagai mekanisme di badan legislatif;
- Mengikutsertakan masyarakat sipil dan media;
- Mengawasi berbagai pelanggaran KBB melalui mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat regional maupun internasional.

Panduan

Panduan ini menguraikan ragam mekanisme yang bisa Anda terapkan

¹ Panduan IPPFoRB ini hasil karya Jaringan Solidaritas Kristen (Christian Solidarity Network)



untuk mengadvokasi KBB baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam kapasitas Anda sebagai anggota parlemen internasional:

- Apakah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan itu;
- Bagaimana cara menggunakan mekanisme parlemen untuk mengangkat isu-isu KBB terhadap pemerintah Anda;
- Bagaimana cara mempergunakan mekanisme HAM tingkat regional;
- Bagaimana cara mempergunakan mekanisme tingkat PBB;
- Bagaimana cara mengikutsertakan masyarakat sipil;
- Kesimpulan dan ringkasan aktivitas-aktivitas yang disarankan pada peringatan hari KBB Internasional.

Apakah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Itu?

Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama atau berkeyakinan—yang sering disebut sebagai “kebebasan beragama”, atau paling umum dinamakan dengan “kebebasan beragama dan berkeyakinan” (KBB)—adalah hak fundamental dan universal yang diartikulasikan dalam pasal 18 Deklarasi Universal HAM (DUHAM / UHDR) dan perjanjian HAM internasional lainnya.

KBB ialah hak fundamental, mengingat hal ini merupakan bagian penting dalam kerangka HAM. KBB tersebut bersifat universal menimbang KBB melindungi semua individu, termasuk yang memeluk ajaran atau keyakinan teistik, non-teistik, maupun ateis, termasuk juga mereka yang memilih untuk tidak beragama

maupun berkepercayaan tertentu. KBB melindungi individu, bukan kepercayaan.

Hak ini dapat dipahami dalam hal aspek internal atau privat, atau disebut dengan *forum internum*, serta aspek eksternal atau *forum externum*.

“Forum Internum”

Hak seseorang untuk membentuk, mendukung atau mengganti kepercayaan dan keyakinan hati nurani terdalam (*forum internum*) memperoleh perlindungan mutlak. Artinya, tidak ada keadaan di mana kebebasan bisa dilanggar atau dibatasi dengan alasan apapun, termasuk karena berbagai alasan keamanan nasional maupun dalam keadaan darurat.

Hak ini meliputi hak untuk membentuk atau memiliki pendapat berdasarkan pada kesadaran, termasuk kepercayaan yang mungkin dianggap tidak menyenangkan, atau bahkan menyakiti orang lain atau orang lain menyakiti diri kita. Hak ini melindungi hak untuk mendukung suatu agama atau kepercayaan yang dipilih oleh seseorang, atau hak untuk tidak mendukung suatu agama atau kepercayaan, serta hak menolak atau mengganti suatu agama atau kepercayaan, bebas dari paksaan.

“Forum Externum”

Hak seseorang untuk memmanifestasikan atau mempertunjukkan secara terbuka agama atau kepercayaannya, baik secara individu maupun berkelompok (*forum externum*) dapat dibatasi oleh negara, tapi hanya dalam situasi luar biasa, dan pihak yang mensyaratkan pelaksanaan pembatasan harus menyediakan bukti yang sangat meyakinkan.

Komponen KBB ini melindungi hak untuk memmanifestasikan suatu agama atau kepercayaan melalui pengajaran, ibadat, praktek dan bentuk ketaatan ibadat lainnya, termasuk hak untuk membagi agama atau kepercayaan seseorang dengan orang lain, untuk mendorong orang lain—tanpa paksaan—mengadopsi kepercayaan agama yang serupa, serta untuk mempublikasikan dan mendistribusikan literatur dan bentuk informasi yang lain terkait agama dan kepercayaan. Hal itu juga meliputi hak untuk memiliki dan menggunakan bangunan yang ditujukan untuk beribadah dan mengekspresikan suatu agama atau kepercayaan melalui pakaian, ritual dan simbol.

Komite HAM PBB² menyimpulkan bahwa hukum internasional memperbolehkan “restriksi terhadap KBB hanya berlaku jika pembatasan ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moralitas publik, atau hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain”³.

Hukum Internasional

Pasal 18 DUHAM (UDHR) berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan memeluk agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan

ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun privat, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan”.

Pasal 18 DUHAM didefinisikan lebih lanjut dalam KIHSP (ICCPR) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 1966, yang bersama dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Kultural (KIHEKOSOB / ICESCR) membentuk Undang-undang Hak-hak Internasional, Komentar Umum 22 dari Komite HAM memuat rincian penting terkait implementasi pasal 18 KIHSP.

KBB dilindungi dalam sejumlah perjanjian HAM internasional, termasuk di antaranya:

- Konvensi Hak-hak Anak (CRC, pasal 14);
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Pasal 12);
- Deklarasi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan (UNGA, 25 November 1981).

Pelapor Khusus PBB untuk KBB adalah tenaga ahli PBB terkait KBB, yang laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasinya membantu mendefinisikan dan membentuk wacana

² Komite HAM PBB adalah badan ahli independen yang mengawasi implementasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP / ICCPR) dan mempublikasikan Komentar Umum yang menjabarkan interpretasinya terkait

isi pasal-pasal HAM, isu-isu tematis dan metode kerjanya.

³ Komentar Umum nomor 22 Komite HAM PBB. <http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom22.htm>

mengenai isu-isu yang berhubungan dengan KBB.

Mengapa KBB Penting?

KBB adalah suatu hak universal, yang bermanfaat bagi semua orang. KBB menjaga penghormatan atas keragaman, dan pelaksanaannya yang merdeka terbukti telah bersumbangsih untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pembangunan, supremasi hukum, perdamaian dan stabilitas.

Hampir setiap negara di dunia telah berjanji untuk menjunjung tinggi KBB dan 84%⁴ dari populasi dunia mengidentifikasi diri sebagai komunitas umat beragama. Meski demikian, pada 2016 restriksi pemerintah terhadap agama mengalami peningkatan, yang ditandai dengan bertambahnya banyak organisasi dan partai populis di Eropa yang semakin memicu pelecehan dan restriksi atas kelompok minoritas agama. Sebanyak 83 negara (42%) tercatat memiliki restriksi yang tinggi atau sangat tinggi terhadap agama – baik sebagai akibat dari tindakan pemerintah atau karena tindakan permusuhan oleh sejumlah individu, organisasi dan kelompok sosial – sekitar 80 (40%) pada 2015 dan 58 (29%) pada 2007⁵.

Sebagai akibatnya, KBB tak hanya harus dipromosikan, dihormati dan dilindungi secara domestik; kebijakan luar negeri yang efektif pun harus seksama mempertimbangkan KBB.

Terlebih lagi, keberadaan agama mapan, resmi atau mayoritas di suatu negara tidak mengizinkan atau menjustifikasi restriksi yang melucuti hak-hak orang non-pemeluk agama tersebut. “Khususnya, tindakan-tindakan tertentu yang diskriminatif terhadap (non-pemeluk), seperti tindakan yang membatasi kelayakan atas pelayanan pemerintah kepada anggota agama dominan, atau memberikan privilese ekonomi kepada mereka atau memaksakan restriksi khusus terhadap praktek perbadatan keyakinan lain, tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan serta jaminan atas perlindungan yang setara di bawah pasal 26 (KIHP / ICCPR)⁶.”

Beberapa konflik yang terjadi belakangan ini berakar dari, atau diperuncing oleh, perbedaan agama atau penyalahgunaan agama. Karena itu, penting diakui bahwa di dunia yang limbung di mana kemanusiaan menghadapi tantangan baru atau seringkali ekstrem, KBB bisa berperan penting dalam menjamin perdamaian dan keamanan.

Banyak dari negara yang tingkat perdamaianya tergolong rendah memiliki derajat keragaman agama, toleransi dan perhatian yang rendah pula. Dalam pidatonya yang disampaikan di Clarence House pada 2013, Yang Mulia Pangeran Ghazi bin Muhammad, Kepala Penasihat untuk Urusan Keagamaan dan Budaya, yang juga berperan sebagai Utusan Pribadi dari Yang Mulia Raja

⁴ Yayasan Penelitian Pew (Pew Research Foundation), Lanskap Keagamaan Global, Desember 2012, <http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-land->

⁵ Yayasan Penelitian Pew (Pew Research Foundation), Peningkatan Global dari Restriksi terhadap Agama pada tahun 2016, Juni 2018.

⁶ Komentar Umum ICCPR No. 22: Pasal 18 (Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama), <https://www.refworld.org/docid/453883fb22>

Abdullah II di Yordania, memberikan contoh konkret mengenai hal ini: “Bukan suatu kecelakaan ketika melihat Somalia, sebagai negara yang paling homogen di dunia dari sisi keagamaan, rasial dan kesukuan, merupakan negara yang terlemah di dunia sepanjang abad terakhir; sementara itu, Amerika Serikat, sebagai negara yang paling heterogen dan majemuk di dunia, merupakan negara yang paling kuat sepanjang abad kedua puluh.”

Penelitian oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat kebebasan beragama yang lebih besar secara umum lebih sejahtera daripada negara-negara yang memiliki kebebasan beragama yang lebih rendah.

Realisasi KBB juga berkelindan dengan pertumbuhan ekonomi⁷, karena permusuhan dan restriksi keagamaan menciptakan iklim yang tidak kondusif yang dapat menjauhkan investasi lokal maupun internasional dan merusak operasi bisnis.

Bagaimana Menggunakan Mekanisme Parlemen dan Mengangkat Isu KBB bersama dengan Pemerintah

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjunjung tinggi KBB. Sebagai anggota parlemen, ada sejumlah sarana yang tersedia dari dalam sistem parlementer yang bisa didayagunakan untuk mengangkat riwayat KBB bersama dengan pemerintah guna memastikan

agar pemerintah bisa memenuhi komitmen domestik maupun internasionalnya.

Departemen atau Kementerian Pemerintah dengan Tanggung Jawab/Yurisdiksi KBB

KBB berada dalam yurisdiksi beberapa departemen pemerintah:

- Jika pelanggaran terjadi dalam lingkup domestik, departemen yang bertanggung-jawab adalah departemen dalam negeri dan hukum.
- Terkait pelanggaran yang terjadi di mana saja, departemen dalam negeri mungkin perlu memproses aplikasi suaka dalam kasus-kasus yang misalnya terkait persekusi agama.
- Kementerian luar negeri atau kementerian setingkat merupakan departemen inti yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengembangan KBB di dunia. Anda bisa menyelidiki posisi kebijakan yang disalurkan melalui jaringan kedutaan nasional di seluruh dunia dan dalam forum internasional semisal PBB.
- Departemen yang bertanggung jawab mengadministrasi bantuan luar negeri bisa juga mempertimbangkan HAM, termasuk KBB dalam pelaksanaannya.
- Pertahanan dan Perdagangan kerap merupakan wilayah inti kerjasama antarnegara di mana

⁷ Grim, Clark and Snyder, Apakah Kebebasan Beragama Baik bagi Bisnis, 2014, <http://www.religjournal.com/pdf/ijrr10004.pdf>

isu HAM, termasuk KBB, bisa diselesaikan.

Untuk menginterogasi kebijakan pemerintah Anda terkait KBB, Anda bisa menghubungi salah satu atau beberapa departemen tersebut di atas.

Pertanyaan Parlementer

Pertanyaan parlementer mungkin istilahnya dikenali secara berlainan tergantung negaranya masing-masing. Misalnya, di India pertanyaan seperti itu mungkin diberi markah bintang (yang memerlukan jawaban lisan), pertanyaan tidak berbintang (yang membutuhkan jawaban tertulis) atau pertanyaan berupa pemberitahuan singkat (pertanyaan mendesak), yang membutuhkan respon paling lama dalam sepuluh hari. Pertanyaan mendesak secara khusus menjadi efektif manakala ada isu mendesak terkait KBB yang menjalar dengan cepat.

Pertanyaan parlementer, baik secara tertulis maupun lisan, merupakan kesempatan untuk:

- Mangangkat pelanggaran atas KBB yang terjadi dalam skala lokal, demi tindakan perbaikan yang tepat;
- Mempertanyakan apa kebijakan pemerintah Anda dalam melindungi dan mempromosikan KBB di seluruh dunia;
- Mempertanyakan apa isu-isu atau kasus-kasus KBB yang diangkat oleh pemerintah Anda kepada pemerintah di negara-negara lain;
- Menuntut aksi terkait kasus tertentu atau pelanggaran HAM;
- Memastikan bagaimana pemerintah Anda

mempertimbangkan KBB dalam sektor perdagangan, pertahanan dan perjanjian atau negosiasi bantuan atau.

Pertanyaan Lisan

Pertanyaan lisan merupakan tanya jawab yang terjadwalkan dalam kalender parlemen bersama para menteri yang bertanggung jawab terhadap beberapa departemen.

Contoh Aktivitas:

- Jika ada rapat dengar pendapat dengan menteri yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri atau dalam momen menjelang peringatan Hari FoRB (KBB) Internasional, ajukanlah pertanyaan seperti contoh berikut:
- Bertanya kepada Menteri Luar Negeri terkait penilaian terakhir yang ia lakukan terkait penghormatan terhadap KBB di seluruh dunia dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mempromosikannya.

Pertanyaan tambahan kerap kali bisa diajukan untuk menekan pemerintah dalam mengambil tindakan lebih lanjut.

Di berbagai belahan dunia, KBB sering diremehkan dengan semena-mena. Akankah pemerintah mendirikan komite/utusan khusus untuk KBB sebagai penasihat mengenai isu-isu ini?

Pertanyaan Tertulis

Pertanyaan parlementer tertulis tidak tergantung pada kalender parlementer.

Kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk bertanya kepada menteri secara langsung. Pertanyaan tertulis itu berfaedah karena Anda kemungkinan besar dapat memperoleh jawaban yang lebih menyeluruh. Ada banyak kesempatan ideal untuk bertanya secara lebih terperinci, misalnya:

Bertanya kepada Menteri Pembangunan Internasional (dalam sistem Kementerian Luar Negeri dari Negara Persemakmuran Inggris) terkait bantuan apa saja yang diberikan oleh departemennya terhadap minoritas agama yang terdampak langsung oleh aktivitas Negara Islam di Iraq dan Syria (ISIS).

Surat Resmi ke Para Menteri

Untuk memperoleh jawaban lebih lengkap dari menteri atau departemen pemerintah, Anda bisa menulis surat formal kepada menteri terkait, dengan melampirkan laporan riset atau uraian singkat yang memberikan informasi lebih lanjut. Surat yang ditandatangani oleh sejumlah anggota parlemen akan mengomunikasikan tingkat keprihatinan atas suatu masalah secara lebih lanjut, terlebih jika ini terkait antarberbagai partai.

Pernyataan

Untuk menarik perhatian pada berbagai kasus atau situasi tertentu, Anda bisa bekerja dengan kolega yang berpandangan sama untuk merilis pernyataan umum bersama. Inisiatif ini akan memancing ketertarikan media dan membawa permasalahan ini kepada audiens lebih luas baik di tingkat lokal maupun internasional. Pernyataan ini bisa dilakukan sejalan dengan surat advokasi yang diinisiasi oleh IPPFoRB.

Debat

Debat memberi ruang kesempatan bagi diskusi lebih panjang dan fokus terkait suatu permasalahan. Debat juga merupakan kesempatan untuk mempresentasikan rekomendasi kepada pemerintah dan menantang jawaban-jawaban menteri.

Contoh aktivitas:

Jadwalkan debat terkait situasi KBB di seluruh penjuru dunia dan bagaimana tanggapan pemerintah.

Dengar Pendapat

Menyelenggarakan dengar pendapat memberikan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu yang jarang terangkat, menyimak suara masyarakat sipil yang melek informasi dan/atau korban pelanggaran (dengan syarat tersedia kondisi aman bagi mereka untuk berpartisipasi), dan meningkatkan kesadaran atas suatu permasalahan.

Contoh aktivitas:

- Menyelenggarakan dengar pendapat terkait KBB bersama dengan masyarakat sipil, menekankan situasi gawat tertentu atau mendiskusikan titik persinggungan antara KBB dan isu-isu HAM lainnya, seperti kebebasan berpendapat, hak-hak perempuan atau hak-hak anak.

Legislasi

Anda bisa mengusulkan legislasi baru terkait kesetaraan dan non-diskriminasi, hak-hak minoritas dan KBB dan/atau

mengumpulkan revisi terhadap rancangan legislasi yang berpotensi melemahkan hak-hak fundamental dan kebebasan termasuk KBB. Hubungan baik dengan masyarakat sipil bisa membantu dalam persoalan ini, mengingatkan masyarakat sipil nasional maupun internasional (NGOs) kemungkinan bisa mengidentifikasi prakarsa legislasi yang sangat mengkhawatirkan, dan mengusulkan amandemen yang mungkin bisa melindungi KBB dengan lebih baik.

Menyapa Konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil)

Anda bisa menyelidiki berbagai kasus penangkapan, mengamati persidangan untuk memastikan bahwa proses hukum yang adil terpenuhi, mengunjungi tahanan dan bertemu masyarakat sipil, termasuk para pemuka agama, kelompok persyarikatan perempuan dan anak muda baik dari latar belakang lintas iman maupun yang berlatar belakang non-agamis, di dapil lokal. Jika pelanggaran telah terjadi di komunitas lokal yang berbeda, atau di luar negeri, Anda bisa mengunjungi komunitas-komunitas tersebut, mungkin bersama suatu delegasi. Ini akan membuktikan dukungan bagi pihak yang telah mengalami dampak pelanggaran KBB dan akan mengasah serta meningkatkan keahlian Anda untuk ikut serta dalam sejumlah aktivitas parlementer tersebut. Anda juga bisa menggunakan media sosial untuk membagikan rincian penemuan Anda, dan aksi yang telah Anda ambil di parlemen atas nama masyarakat, serta dalam rangka mendukung masyarakat sipil terkait isu-isu atau kasus-kasus tertentu.

Wakil-wakil khusus, utusan-utusan dan duta-duta besar

Sejumlah negara telah membentuk jabatan tertentu berupa utusan atau duta besar untuk KBB dalam rangka meningkatkan fokus kebijakan pemerintah terhadap hak ini.

Beberapa posisi duta besar KBB atau utusan khusus, misalnya:

- Di Amerika Serikat, posisi Duta Besar Keliling Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Tingkat Internasional diciptakan melalui Undang-undang Kebebasan Beragama Internasional pada 1998. Duta Besar Keliling mengepalai Kantor Kebebasan Beragama Internasional (IRF) di Departemen Luar Negeri AS (State Department), yang ditugaskan untuk mempromosikan kebebasan beragama sebagai tujuan inti dalam kebijakan luar negeri. IRF memproduksi laporan tahunan yang menyoroti negara-negara yang menjadi perhatian khusus dan bekerja sama dengan Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF). Duta Besar Keliling diajukan Presiden, sebelum disetujui Senat.
- Pada 2012, Norwegia membentuk jabatan posisi Utusan Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di bawah struktur kementerian luar negeri untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka mempromosikan kebebasan beragama di luar negeri.

- Komisi Uni Eropa menciptakan posisi Utusan Khusus untuk mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan di luar Uni Eropa pada Mei 2016, dengan mandat operasional yang berfokus pada penghormatan atas kemajemukan dan dialog antaragama.
- Denmark mendirikan Kantor Perwakilan Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada Januari 2018, di bawah yurisdiksi Kantor Luar Negeri Denmark. Peranannya adalah berwenang untuk mempromosikan kebebasan beragama dan berhati nurani di seluruh dunia sebagai hak asasi fundamental; untuk membantu minoritas agama dalam menjunjung tinggi hak-hak mereka; untuk membantu organisasi-organisasi non-pemerintah dalam mempromosikan KBB, serta untuk memperkuat proses pelaporan internasional atas pelanggaran-pelanggaran KBB yang resmi dibuat Denmark.
- Kabinet Jerman menciptakan peranan Komisioner Pemerintah Federal untuk Kebebasan Beragama Tingkat Global pada Maret 2018, di bawah yurisdiksi Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Komisioner mempresentasikan laporan terkait kebebasan beragama terhadap Pemerintah Federal setiap dua tahun sekali.
- Kerajaan Inggris mengangkat utusan khusus untuk KBB pada Juli 2018. Lingkup perannya belum ditentukan.

Contoh Aktivitas:

- Jika negara Anda memiliki utusan atau duta besar, berkomunikasi dengan mereka dan alihkan perhatian mereka kepada beberapa isu khusus terkait KBB;
- Susun pertanyaan atau tulislah surat yang menyeru pemerintah Anda untuk memperkuat posisi ini, jika diperlukan;
- Susun pertanyaan atau tulislah surat yang menyeru pemerintah Anda untuk menciptakan posisi, jika posisi tersebut belum ada, karena kewenangan posisi ini bermanfaat.

Mohon dicatat: Sebelum melaksanakan aksi ini, lakukan penelitian untuk mempertimbangkan tindakan paling efektif. Masyarakat sipil yang relevan bisa menawarkan rekomendasi-rekomendasi menyangkut tawaran untuk membuat posisi ini menjadi lebih efektif, jika posisi ini telah ada, atau apakah pembentukan kewenangan peran serupa berguna untuk meningkatkan advokasi KBB.

Berbagai Kelompok Antar-Partai, Kaukus dan Koalisi

Kelompok-kelompok antarpantai di Parlemen Eropa menyediakan *platform* (program parpol) yang kuat bagi anggota parlemen untuk mengangkat dan membedah isu-isu KBB secara kolektif.

Berbagai kelompok antarpantai di parlemen bisa secara spesifik tergantung negara-negara tertentu, atau tergantung tema-tema tertentu terkait KBB. Kelompok-kelompok ini bisa

menyelenggarakan kegiatan dalam badan-badan legislatif yang meliputi masukan dari masyarakat sipil. Aktivitas khusus semacam ini kerap lebih menarik perhatian media, yang terbiasa melaporkan kegiatan parlemen. Contohnya, Kelompok Antar-Partai Parlemen Kerajaan Inggris untuk KBB Internasional mempublikasikan laporan-laporan bekerja sama dengan masyarakat sipil dan mengkoordinir dengar pendapat serta aksi lainnya untuk mempromosikan KBB di Parlemen Kerajaan Inggris.

Beberapa contoh kelompok nasional lainnya termasuk: Anggota-anggota Parlemen Pakistan untuk Kebebasan Beragama dan Harmoni Antar-Agama; IPPFoRB Nepal, IPPFoRB Brazil, IPPFoRB Honduras, Kelompok Parlementer Norwegia untuk Kebebasan Beragama, Jaringan Antar-Parlemen Denmark untuk KBB, Anggota-anggota Parlemen Kanada untuk KBB, Kaukus Pancasila (kelompok HAM di Parlemen Indonesia yang memandang KBB sebagai prioritas utama).

Contoh Aktivitas:

- Mendirikan atau ikut serta kelompok antarpantai atau kaukus terkait KBB di dalam badan legislatif Anda (DPR) untuk memastikan keberlanjutan fokus terhadap KBB.
- Jika Anda sudah menjadi anggota kelompok antarpantai atau kaukus terkait KBB, buatlah kontak dengan kelompok-kelompok parlementer KBB di negara-negara lain untuk berbagi pengalaman dan agenda, lalu menyusun berbagai kerja sama.

Komite-komite (Parlemen)

Komite bertanggung jawab mengawasi kebijakan pemerintah dan bisa memprakarsai penyelidikan terhadap isu-isu tertentu. Jika ada penyelidikan masalah HAM, kirimkan informasi yang relevan dengan KBB. Berkiprah dalam berbagai komite HAM menjadi penting untuk mengarusutamakan KBB ke dalam diskusi-diskusi dan pengambilan keputusan mengenai HAM. Jika tidak mungkin, berkomunikasi dengan Ketua dari komite terkait dan ambillah inisiatif untuk menyelidiki isu-isu HAM yang meliputi persoalan KBB.

Jaringan-jaringan Regional

Selain jaringan internasional, seperti IPPFoRB, jaringan tingkat kawasan menyediakan kesempatan untuk mengadvokasi KBB yang telah ditargetkan. Para anggota parlemen dianjurkan untuk aktif berkecimpung.

Di antara contoh-contohnya antara lain:

- Aliansi Anggota Parlemen untuk Hak Asasi Manusia (APHR), yang terdiri dari anggota dan mantan anggota parlemen dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bekerja untuk menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan serta mempromosikan solusi HAM yang berkelanjutan. APHR sedang dalam proses membangun jaringan parlementer untuk KBB.
- IPPFoRB Latin America: Jika Anda adalah anggota parlemen dari Amerika Latin, Anda bisa menghubungi IPPFoRB Amerika Latin.
- AftiPAHR: Pada 2017, sejumlah anggota parlemen dari negara-negara di Afrika bagian selatan

mendirikan Asosiasi Parlemeter Afrika untuk HAM. Fokus kerja asosiasi ini secara khusus tertumpu pada KBB.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

- Jika Anda berasal dari Kawasan yang tidak memiliki aliansi kawasan seperti di atas, pertimbangkanlah untuk mendirikan jaringan serupa, misalnya “Anggota Parlemen Kawasan Balkan untuk HAM”, sebetulnya IPPFoRB Kaukasus Selatan atau IPPFoRB Timur Tengah.

Bagaimana Berkecimpung dalam Mekanisme Regional HAM

Ada beberapa perjanjian HAM regional yang melindungi KBB, melengkapi sistem internasional dan mencerminkan nilai-nilai kawasan terkait, selain nilai-nilai universal, contohnya:

- Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1950)
- Konvensi Amerika untuk HAM (1969)
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (1981)
- Piagam Arab tentang HAM
- Piagam Hak-hak Fundamental Uni Eropa (2000)

Ketika penyelesaian domestik telah ditempuh, atau jika penyelesaian itu tidak mungkin terjangkau karena persoalan korupsi atau keadaan bahaya, maka tindakan mungkin selanjutnya ialah membawa kasus-kasus yang terpaut

dengan pelanggaran HAM itu ke berbagai lembaga dan mekanisme HAM di tingkat regional.

Uni Afrika

Komite Perwakilan Permanen (PRC) terdiri dari wakil-wakil setara duta besar dari negara anggota Uni Afrika yang terakreditasi. Ini merupakan badan penasihat dengan sejumlah sub-komite (meski tidak satupun terkait KBB), yang mempersiapkan agenda pertemuan dengan Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif yang terdiri dari menteri-menteri luar negeri mempunyai mandat luas yang meliputi koordinasi serta mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan di kawasan yang menjadi kepentingan bersama bagi negara-negara anggota. Dewan ini juga menyusun agenda untuk organ primer Uni Afrika, yakni Majelis Uni Afrika, yang mengadakan pertemuan dua kali setahun dan terdiri dari kepala negara dan kepala pemerintahan atau wakil-wakil mereka yang resmi diakui; mengambil keputusan-keputusan yang berkekuatan tetap atau pernyataan yang berisi petunjuk. Setiap negara anggota, organ Uni Afrika maupun Komunitas Ekonomi Regional bisa mengusulkan materi untuk rencana kerja bersama.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

- Ketika isu signifikan terkait KBB atau pelanggaran yang serius ataupun sedang terjadi muncul ke permukaan, advokasikan hal ini kepada pemerintah yang peduli untuk menempatkan permasalahan tersebut dalam agenda majelis Uni Afrika sehingga bisa didiskusikan dalam pertemuan level kepala negara.

Implementasi Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat

Hak atas KBB disebutkan beberapa kali dalam Piagam Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat, khususnya dalam pasal 8: “Kebebasan hati nurani, profesi dan praktek bebas beragama harus dijamin. Setiap orang tunduk pada hukum dan ketertiban sehingga tak satu pun dari mereka bisa jatuh dalam tindakan yang membatasi pelaksanaan berbagai kebebasan tersebut.

Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat didirikan untuk mempermudah pelaksanaan piagam tersebut.

Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika

Komisi yang berbasis di Banjul, Gambia, ini memiliki tiga fungsi utama:

- Perlindungan atas hak asasi manusia dan rakyat;
- Dukungan atas hak asasi manusia dan rakyat;
- Interpretasi Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat

Setiap negara diwajibkan untuk mengumpulkan laporan awal kepada Komisi dua tahun setelah ratifikasi atau pencapaian terhadap Piagam Afrika, dan laporan berkala setiap dua tahun menyangkut tindakan-tindakan yang telah diambilnya untuk menjunjung tinggi berbagai hak dan kebebasan yang digarisbawahi di dalam Piagam Afrika. Ketika peninjauan atas suatu negara jatuh tempo, Anda bisa memeriksa

laporan negara Anda melalui laman web Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat dan terlebih dahulu memberikan arahan kepada komisioner yang berkepentingan mengenai isu-isu terkait.

Selain 11 komisioner, ACHPR memiliki kelompok-kelompok kerja yang menginvestigasi isu-isu tertentu. Kelompok kerja ini juga menyelidiki beberapa pelapor khusus yang mengumpulkan laporan atas berbagai dugaan pelanggaran. Meski demikian, tidak ada pelapor khusus terkait KBB.

Keluhan bisa diajukan kepada ACHPR terhadap negara tertentu penandatanganan Piagam Afrika sejauh penyelesaian hukum domestik belum terpenuhi. ACHPR bisa merespon dengan cepat atas berbagai keluhan yang mendesak, bisa membuat kesimpulan atau keputusan dan berbagai rekomendasi, serta mengadopsi resolusi tematik dan spesifik terkait suatu negara maupun resolusi-resolusi administratif terhadap isu-isu HAM.

Meskipun, implementasi yang ada tetap bermasalah, mengingat ACHPR tidak memiliki mandat maupun kemampuan untuk mengawasi atau memaksa pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan. Kendatipun demikian, resolusi tetap memiliki kekuatan moral dan bisa mempermudah aksi di arena lain. Contohnya, resolusi ACHPR yang lama tak terwujud merupakan cikal bakal panggilan aksi yang berujung pada pembentukan pelapor khusus dan komisi penyelidikan atas Eritrea.

Keluhan terhadap ACHPR bisa diajukan ke:

Sekretaris
Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia
dan Rakyat

31 Bijilo Annex Layout, Kombo North
District, Western Region P.O. Box 673
Banjul The Gambia

Telepon: (220) 441 05 05 or 441 05 06 Fax:
(220) 441 05 04
Email: au-banjul@africa-union.org
www.achpr.org

Pengadilan Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat

Pengadilan Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat ialah badan yudisial yang bertugas demi perlindungan HAM dan diharapkan dapat bekerja sama dengan ACHPR. Agar keputusan-keputusan Pengadilan Afrika mengikat secara hukum, yurisdiksi pengadilan harus sudah diterima oleh negara terkait. Hanya delapan negara yang telah menerimanya.⁸

Sepanjang suatu negara telah mendeklarasikan penerimaan terhadap yurisdiksinya, Pengadilan Afrika itu bisa menerima kasus-kasus yang diajukan oleh ACHPR, Organisasi Antar-Pemereintah Afrika, NGO dengan status pengamat di dalam ACHPR dan juga individu-individu. Pangujuan tidak dibebankan biaya dan tidak ada undang-undang pembatasan terhadap suatu kasus, selain “waktu yang masuk akal sejak tanggal dipenuhinya penyelesaian lokal”.

Informasi terkait bagaimana cara mengajukan kasus bisa diakses secara

daring. Kasus-kasus bisa diajukan di Pengadilan Afrika yang terletak di Arusha, Tanzania, via pos, email, fax atau kurir:

The Registrar

African Court on Human and Peoples’
Rights Mwalimu Julius Nyerere
Conservation Centre, Dodoma Road, P.O.
Box 6274, Arusha, Tanzania

Telepon:+255-272970430

Email: registrar@african-court.org atau
info@african-court.org

Contoh Advokasi yang Disarankan:

Sokong negara Anda untuk mengakui yurisdiksi Pengadilan Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat, jika belum melakukannya.

Parlemen Pan-Afrika

Parlemen Pan-Afrika (PAP) adalah lembaga legislatif Uni Afrika, dan bertugas memberikan “suara bagi masyarakat dan diaspora Afrika”, serta mempromosikan “prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak rakyat, serta demokrasi di Afrika”. Lembaga ini terdiri dari lima anggota parlemen dari setiap negara anggota Uni Afrika, yang tidak secara langsung terpilih, dan mengadakan dua sesi pleno serta dua sidang dari Komite-komite Permanen tiap tahunnya.

Sembilan Komite Permanen, satu komite ad-hoc, termasuk komite Keadilan dan HAM, yang antara lain bertujuan untuk berjuang “mempromosikan

⁸ Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, Ghana, Mali, Malawi, Tanzania dan Republik Tunisia (per Februari 2018)

penghormatan atas dan mengembangkan prinsip-prinsip mulia terkait kemerdekaan, kebebasan sipil, keadilan, hak asasi manusia dan rakyat serta hak-hak fundamental dalam konteks Uni Afrika”. Komite ini beserta lima Kaukus Regional PAP⁹ adalah wahana berguna untuk mengadvokasi konsensus terkait beragam masalah, termasuk isu-isu KBB.

Sementara PAP tidak memiliki kekuatan legislatif yang mengikat, Ketentuan 72 (1) dari aturan prosedurnya menyatakan bahwa “setiap warga negara dari salah satu negara anggota memiliki hak untuk menyelesaikan sebuah petisi kepada parlemen terkait suatu permasalahan yang berada di bawah aktivitas Uni Afrika dan yang secara langsung berhubungan dengannya.” Oleh karena itu, sebuah petisi bisa diajukan kepada PAP dalam rangka membangun kesadaran atas pelanggaran KBB.

Sebagai jalan alternatif, anggota-anggota parlemen Afrika bisa menghubungi anggota parlemen PAP dan meminta mereka untuk mengangkat usulan ini agar debat dapat digelar. Penting dicatat, suatu usulan perlu didukung oleh anggota parlemen yang lain sebelum dilaksanakannya diskusi. Jika PAP memutuskan bahwa PAP memerlukan informasi lebih lanjut terkait suatu permasalahan, PAP bisa membentuk tim pencari fakta atau misi peninjau dan mengirim mereka ke negara yang sedang diselidiki. Ini juga dapat menjadi langkah efektif dalam menyoroti soal pelanggaran KBB.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

⁹ Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Selatan dan Afrika Barat.

- Ajukan petisi terkait isu penting KBB kepada PAP;
- Desak anggota-anggota parlemen PAP untuk mengangkat dan mendukung usulan terkait KBB untuk menggelar debat;

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

Mekanisme HAM ASEAN hanya sebatas Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children/ACWC), Komite Perempuan ASEAN (ASEAN Committee on Women/ACW) dan Komite untuk Implementasi Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja-pekerja Migran (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers/ACMW). Dokumen HAM ASEAN juga hanya sebatas Deklarasi HAM ASEAN (AHRD). Baik AICHR maupun AHRD memiliki kelemahan dan kontradiksi. Selain itu, tidak ada peradilan regional atau mekanisme di mana para korban bisa mengangkat pelanggaran-pelanggaran KBB di luar sistem peradilan domestik mereka.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

Bergabunglah dengan Anggota-anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) atau

Anggota-anggota Parlemen Asia Tenggara untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Southeast Asia Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief/SEAFORB) dan kemudian turut dalam advokasi sebagai jaringan, bekerjasama dengan masyarakat sipil, untuk mereformasi mekanisme HAM ASEAN, termasuk memperkuat Deklarasi HAM ASEAN dan pendirian mekanisme keluhan dan peradilan menyangkut HAM.

Dewan Eropa (Council of Europe/CoE) di Uni Eropa

Dewan Eropa adalah organisasi HAM utama di kawasan Eropa, yang terdiri dari 47 anggota. Dikepalai oleh sekretaris umum dan pembantu sekretaris umum, CoE juga memiliki Komite Menteri-menteri yang terdiri dari menteri-menteri luar negeri dari negara-negara anggota, yang memutuskan kebijakan dan menyetujui anggaran dan aktivitas di lapangan. CoE juga memiliki komisioner HAM, yang secara independen menyorot isu-isu HAM. Selain menjadi dewan perdebatan, 324 anggota majelis parlemen memilih sekretaris umum, komisioner HAM dan hakim-hakim Pengadilan Eropa, mengawasi pemilihan umum dan menilai debat-debat di berbagai komite. CoE juga memiliki Konferensi Internasional Organisasi-organisasi Non-pemerintah (INGOs) yang terdiri dari 400 organisasi.

Badan utama CoE yang lain adalah Pengadilan Eropa (ECtHR), tugasnya menjamin hak-hak yang dilindungi di bawah Konvensi HAM Eropa (ECHR).

Pasal 9 Konvensi HAM Eropa berbunyi:

“1. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama; hak ini meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan dan

kebebasan, baik sendiri maupun dalam komunitas bersama yang lain dan di ruang publik atau privat, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya, dalam beribadah, pengajaran, praktek dan ketaatan.

2. Kebebasan untuk menunjukkan agama atau kepercayaan seseorang hanya bisa dibatasi sesuai dengan undang-undang dan jika dinilai perlu di dalam komunitas yang demokratis sesuai dengan kepentingan bersama dalam menjamin keamanan umum, demi perlindungan ketertiban umum, kesehatan atau moralitas publik, atau demi perlindungan hak dan kebebasan orang lain.”

ECHR melindungi hak-hak manusia di seluruh 47 negara anggota CoE. Dalam beberapa keadaan, ECHR juga bisa melindungi hak-hak orang di negara lain. Apabila hak seseorang yang terlindungi di bawah ECHR dilanggar dan orang tersebut tidak bisa menjangkau penyelesaian hukum di dalam negerinya, mereka bisa membawa kasusnya ke Pengadilan HAM Eropa. Pengadilan mengadili kasus-kasus dengan menerapkan dan menafsirkan ECHR, serta mengeluarkan ketetapan yang mengikat secara hukum yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional dan lokal.

Kebijakan Internal:

Pasal 10 dari Piagam Hak-hak Fundamental Eropa menyatakan:

“1. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak ini meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan dan kebebasan, baik sendiri maupun dalam komunitas bersama dengan yang lain dan di publik atau privat, untuk memmanifestasikan agama atau

kepercayaannya, dalam beribadah, pengajaran, praktek dan ketaatan.

2. Hak atas keberatan hati nurani diakui, sesuai dengan hukum-hukum nasional yang mengatur pelaksanaan hak.”

Piagam Hak-hak Fundamental Eropa mengusung sekaligus seluruh hak baik personal, sipil, politik, ekonomi maupun sosial yang dinikmati oleh masyarakat di dalam Uni Eropa. Piagam tersebut memiliki kekuatan hukum dengan berlakunya Perjanjian Lisbon pada Desember 2009. Piagam ini konsisten dengan ECHR dan memperkuat promosi hak-hak fundamental dengan membuatnya lebih terlihat dan eksplisit. Pada 2010, Komisi Eropa mengadopsi strategi untuk mengawasi dan memastikan implementasi efektif dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan di dalam Piagam.

Agensi Uni Eropa untuk Hak-hak Fundamental (The EU Agency for Fundamental Rights/FRA) mengumpulkan data dan informasi serta menyediakan masukan ahli untuk institusi-institusi Uni Eropa dan negara anggota dalam rangka memastikan bahwa hak-hak fundamental masyarakat yang tinggal di Uni Eropa terlindungi. FRA juga menyokong dialog dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan pengetahuan publik atas hak-hak fundamental dan menyebarkan hasil pekerjaannya. FRA mengatasi KBB dalam konteks kerja tematik terkait kesetaraan dan non-diskriminasi serta bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan berbagai aksi gabungan dan kerja sama antara pihak-pihak yang termotivasi oleh agama dan pihak-pihak

yang termotivasi oleh HAM untuk mewujudkan masyarakat adil.

FRA mempertahankan komunikasi berkelanjutan dengan institusi Uni Eropa dan Negara Anggota. Staf Penghubung Nasional Lisbon (National Lisbon Officers/NLOs) adalah titik kontak utama bagi FRA di berbagai negara anggota. NLOs, yang merupakan pejabat pemerintahan, bisa mengajukan opini terkait rancangan program tahunan FRA, memberikan pemahaman lebih besar bagi Agensi ini terkait jenis analisis hak-hak fundamental dan bantuan yang diperlukan oleh Negara Anggota untuk membentuk kebijakan nasional yang bermutu.

Aksi Eksternal: Panduan Mengenai KBB

Pada 2013, Majelis Luar Negeri Uni Eropa mengadopsi Panduan Uni Eropa untuk promosi dan proteksi KBB, yang bertujuan untuk memajukan promosi KBB dalam lingkup aksi eksternal, termasuk melalui instrumen finansial. Sementara panduan ini merupakan landasan kuat untuk perlindungan KBB, kesadaran dan literasi atas KBB relatif rendah di antara staf Uni Eropa dan memerlukan sistem pengawasan yang lebih efisien.¹⁰

Utusan Khusus untuk Promosi KBB di luar Uni Eropa

Posisi Utusan Khusus untuk KBB dibentuk pada Mei 2016 oleh Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, telah dijabat oleh Ján Figel sejak masa awal berdiri.

¹⁰ Amy Shepherd, Manajer Advokasi CSW untuk Uni Eropa, Diplomasi dan Kebulatan tekad: Lima Tahun Panduan KBB Uni Eropa, KBB secara utuh, Blog CSW/Five Years of the EU Guidelines on Freedom of

Religion or Belief, Forb in Full: A blog by CSW, 16 April 2018. <https://forbinfull.org/2018/04/16/diplomacy-and-determination-five-years-of-the-eu-guidelines-on-freedom-of-religion-or-belief/>

Utusan Khusus juga bertugas sebagai Penasihat Khusus untuk Komisioner Kerjasama Internasional dan Pembangunan yang berkoordinasi dengan Layanan Aksi Eksternal Eropa (EEAS). Posisi Utusan Khusus saat ini memiliki mandat yang dapat diperbaharui setiap tahun.

Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia (EU Special Representative for Human Rights/EUSR)

Peran Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia, posisi yang dibentuk pada Juli 2012, adalah untuk memperkuat efektivitas dan visibilitas kebijakan-kebijakan HAM Uni Eropa. EUSR memiliki mandat yang luas, luwes dan erat bekerja sama dengan Utusan Khusus untuk Promosi KBB di luar Uni Eropa.

Parlemen Uni Eropa (EU Parliament/EP)

EP adalah badan Uni Eropa tunggal yang dipilih secara langsung. EP memiliki 22 Komite Tetap, termasuk tentang hak asasi manusia (DROI) dan urusan luar negeri (AFET), yang membantu Komisi Eropa (European Commission/EC)¹¹ dalam menyusun undang-undang. Komite-komite ini juga dapat membuat sub komite, seperti Sub Komite Hak Asasi Manusia di bawah kontrol Komite Urusan Luar Negeri. Parlemen juga memiliki satuan “Antarkelompok”, dan yang paling relevan adalah Antarkelompok tentang kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Toleransi Beragama. Jika Anda

adalah seorang anggota dari Parlemen Eropa (MEP), Anda dapat bergabung dengan Antarkelompok non-partisan ini, yang didedikasikan untuk memastikan bahwa aksi eksternal Uni Eropa benar-benar mempromosikan dan melindungi FoRB. Komite Antarkelompok membantu dalam mematangkan ide-ide untuk kebijakan Uni Eropa baru dan undang-undang tentang KBB. Komite ini bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk menyuarkan isu-isu KBB yang mendesak sehingga menjadi perhatian para pembuat kebijakan utama Uni Eropa. Kegiatannya termasuk menerbitkan laporan tahunan tentang situasi KBB di seluruh dunia.

Contoh Advokasi yang Disarankan untuk anggota parlemen Dewan Eropa:

- Gunakan mekanisme parlementer untuk menguatkan perlindungan ECHR dan dukung implementasi dari seluruh putusan ECtHR.

Untuk Politisi Uni Eropa:

- Gunakan mekanisme parlementer untuk mempromosikan dan melindungi FoRB di Uni Eropa dan sekitarnya dan mendorong NLOs untuk terlibat lebih aktif dengan FRA.

Untuk MEPs (Anggota Parlemen):

- Bergabung dan mendukung aksi-aksi Antarkelompok untuk KBB;
- Gunakan mekanisme parlementer untuk mengangkat masalah KBB ke Parlemen Eropa;

¹¹ EC adalah lembaga eksekutif Uni Eropa. EC “mempromosikan kepentingan Uni Eropa secara umum dengan mengusulkan dan mengimplementasikan undang-undang, serta

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan anggaran Uni Eropa”. [https:// europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en)

- Terlibat dengan jaringan masyarakat sipil Platform Eropa Anti-Intoleransi dan Diskriminasi Agama (European Platform against Religious Intolerance and Discrimination/EPRID) untuk kampanye dan advokasi KBB lebih lanjut di tingkat Uni Eropa.

Untuk Semua:

- Undang EUSR tentang Hak Asasi Manusia dan Utusan Khusus KBB untuk mengunjungi negara Anda dan bertemu dengan politikus tingkat tinggi;
- Bertemu dengan anggota Parlemen Eropa dan Delegasi Uni Eropa lainnya saat mereka mengunjungi negara Anda dan doronglah mereka untuk mengambil tindakan terhadap KBB di tingkat Uni Eropa;
- Berhubungan dengan Delegasi Uni Eropa di tingkat lokal untuk membantu mewujudkan Panduan KBB di tingkat nasional;
- Meminta bantuan Uni Eropa dalam mengangkat kasus-kasus KBB yang bersinggungan dengan pelanggaran HAM;
- Gunakan Pedoman KBB dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Uni Eropa sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan/memperkuat rencana aksi nasional mengenai KBB;
- Gunakan mekanisme parlementer untuk mendesak agar KBB masuk

dalam agenda selama berlangsungnya berbagai dialog hak asasi manusia Uni Eropa, negosiasi perdagangan dan diskusi kerja sama regional;

- Jika berlaku, gunakan mekanisme parlementer untuk membawa masalah ForB ke dalam tinjauan GSP+¹²;
- Terlibatlah dengan berbagai Organisasi Non-pemerintah Internasional (INGO) yang melakukan advokasi Uni Eropa dan mengartikulasikan keprihatinan nasional kepada audiens internasional.

Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (The Inter-American Commission on Human Rights/IACHR)

IACHR adalah organ otonom dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). IACHR bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan bersama dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, IACHR merupakan lembaga utama untuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem yang berlaku lintas-benua Amerika. IACHR bisa menerima petisi individual; memantau situasi hak asasi manusia di negara-negara anggota, dan memeriksa masalah tematik dan prioritas.

¹² GSP+ adalah komponen EU Generalized Scheme of Preferences ('GSP') untuk negara berkembang. GSP+ menawarkan insentif perdagangan tambahan kepada negara-negara berkembang yang telah mendapatkan manfaat dari GSP+ untuk mengimplementasikan konvensi

internasional inti tentang hak asasi manusia dan tenaga kerja, pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm

Pasal 44 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Setiap orang atau kelompok orang, atau entitas nonpemerintah lainnya yang diakui secara hukum di satu atau lebih negara anggota Organisasi, dapat mengajukan petisi kepada Komisi yang berisi pengaduan soal pelanggaran atas Konvensi ini oleh suatu pihak negara anggota.”

IACHR dapat mengunjungi negara-negara untuk menilai situasi hak asasi manusia, dan kemudian mengeluarkan rekomendasi. IACHR juga dapat menunjuk pelapor tematik untuk memusatkan perhatian pada pelanggaran tertentu dari komunitas yang ditargetkan. Saat ini ada 10 pelapor khusus; namun, tidak ada yang terkait KBB.

IACHR mempertimbangkan laporan dari individu mengenai dugaan pelanggaran atau pengaduan, dan dapat menjajaki kemungkinan untuk ‘penyelesaian secara kekeluargaan’. Jika gagal, IACHR dapat merujuk masalah tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, selama negara yang bersangkutan telah menerima yurisdiksi Pengadilan tersebut. Hanya negara bagian dan Komisi yang dapat mengajukan kasus ke Pengadilan.

Dalam kasus serius dan mendesak yang mana terdapat bahaya langsung, IACHR dapat meminta tindakan pencegahan. Ini dapat diajukan melalui petisi oleh individu atau oleh IACHR itu sendiri.

Bagaimana mengajukan petisi ke IACHR

Panduan untuk mengajukan petisi ke IACHR, termasuk petisi untuk tindak pencegahan atas situasi khusus dan mendesak, tersedia secara daring dalam bahasa Spanyol, Prancis, Inggris dan Portugis.

Setiap orang, sekelompok orang, atau organisasi, sendiri atau mewakili orang lain, dapat mengajukan petisi. Pemohon atau perwakilan juga dapat diubah selama keberlangsungan proses tersebut. IACHR harus diberitahu terkait hal ini secara tertulis.

IACHR tidak dapat memeriksa petisi kecuali semua upaya hukum domestik telah ditempuh. IACHR menganggap upaya hukum domestik sebagai upaya yang dianggap memadai dan efektif, sehingga pengadilan domestik hanya dapat dilangkahi jika pengadilan domestik itu tidak melindungi hak yang dilanggar, atau tidak memiliki kapasitas untuk memastikan penegakan keputusannya.

Statuta pembatasan pengajuan petisi adalah dalam waktu enam bulan sejak semua jalur domestik ditempuh.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

- Ikutilah laporan IACHR secara dekat dan advokasikan terhadap pemerintah Anda tentang rekomendasi di dalamnya;
- Ajukan petisi-petisi terkait pelanggaran KBB dengan IACHR. Ini juga berpotensi mendorong terciptanya pelapor khusus tentang KBB.

Bagaimana Melibatkan Diri dengan Mekanisme Hak Asasi Manusia PBB

Ada sejumlah mekanisme PBB yang melaluinya masalah KBB dapat diangkat. Namun, untuk tujuan anggota parlemen, bentuk keterlibatan yang paling tepat adalah dengan Prosedur Khusus, dan terutama, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang mengundang badan-badan hak asasi manusia nasional, organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah, komunitas agama atau kepercayaan serta individu untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya yang mereka miliki tentang potensi atau pelanggaran nyata KBB. Dr Ahmed Shaheed adalah pemegang mandat saat ini.

Pelapor khusus ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC), dengan mandat untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan yang muncul terkait hak atas KBB. Pelapor khusus menjalankan misi pengungkapan fakta, serta berkomunikasi langsung ke berbagai negara mengenai pelanggaran KBB yang telah dilaporkan kepadanya serta menyerahkan laporan tahunan dan rekomendasi ke HRC.

Informasi yang dikirim kepada pelapor khusus tentang dugaan pelanggaran tetap dirahasiakan hingga pelapor khusus mengirimkan kepada para tersangka kasus banding atau komunikasi (surat) mendesak yang menguraikan kekhawatiran sekaligus rekomendasi. Komunikasi yang dikirim dan tanggapan

yang diterima disusun menjadi laporan publik untuk HRC.

Untuk mengirimkan komunikasi ke suatu negara, pelapor khusus tidak membutuhkan syarat bahwa negara bersangkutan telah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional atau regional, atau bahwa tersangka korban telah menempuh jalur hukum domestik. Pengajuan banding individu dapat diajukan melalui kuesioner baik secara daring, melalui surat atau email.

Meski demikian, pelapor khusus tidak dapat mengambil tindakan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari korban atau perwakilan hukum atau anggota keluarga, dan ia membutuhkan persetujuan agar nama korban dikomunikasikan kepada pihak berwenang. Banding dan komunikasi mendesak secara tetap mencakup nama-nama korban yang diduga, kecuali dalam kasus di mana korban (atau perwakilan mereka) dengan jelas menunjukkan masalah keamanan. Prosedur yang sama berlaku untuk kompilasi publik dari komunikasi yang dikirim dan tanggapan yang diterima¹³.

Ketika Negara Anggota PBB mencalonkan sebagai anggota HRC, mereka kerap membuat janji dan komitmen sukarela. Namun, janji ini seringkali samar-samar, memberi kesempatan terbatas untuk akuntabilitas.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

- Dengan menggunakan mekanisme parlementer yang

mencakup ringkasan singkat dari tuduhan yang dikomunikasikan kepada negara bagian dan entitas lain.

¹³ Laporan komunikasi diterbitkan bersama dengan prosedur khusus untuk setiap sesi HRC reguler yang merinci kegiatan mereka, dan

diperinci di bagian awal panduan ini, dorong pemerintah Anda untuk menyampaikan undangan kepada pelapor khusus untuk mengunjungi negara Anda dan untuk menerapkan rekomendasi tentang KBB yang dibuat kepada pemerintah Anda baik dalam laporan pelapor khusus kepada HRC atau selama Universal Periodic Review (UPR) negara Anda¹⁴;

- Menggunakan laporan pelapor khusus untuk menyoroiti masalah legislatif tertentu yang berkaitan dengan KBB dan kasus-kasus yang menjadi perhatian individu;
- Jika pemerintah Anda mencalonkan diri sebagai anggota HRC, terlibatlah dalam proses perancangan janji untuk memastikan pencantuman komitmen yang kuat untuk KBB. Kegiatan yang disarankan termasuk surat resmi menteri, debat parlemen dan pertanyaan lisan atau tertulis tentang masalah tersebut.

Bagaimana Melibatkan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil yang dinamis sangat penting untuk demokrasi dan pemerintahan yang baik. Organisasi masyarakat sipil melakukan advokasi atas nama publik dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Penelitian dan pengalaman spesialis mereka sangat berharga bagi anggota

parlemen yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pelanggaran KBB di negara tertentu atau masalah tematik terkait dengan KBB.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Banyak negara memiliki komisi hak asasi manusia nasional: badan independen yang menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat rekomendasi kepada pemerintah nasional demi pemulihan. Rekomendasi ini tidak mengikat secara hukum, tetapi dapat dirujuk dalam kasus hukum atau dalam upaya advokasi. Misalnya, di Meksiko, temuan investigasi komisi hak asasi manusia nasional terhadap pengusiran paksa komunitas agama dari rumah dan tanah mereka telah digunakan untuk mengadvokasi dalam penggunaan intervensi negara untuk menangani kasus-kasus ini.

Beberapa negara bagian juga memiliki komisi hak asasi manusia regional atau lokal. Misalnya, di India, sebagian besar negara bagian dalam sistem federal memiliki komisi hak asasi manusia sendiri; oleh karena itu, laporan awal pelanggaran hak asasi manusia disarankan agar disampaikan ke komisi hak asasi manusia negara bagian, kemudian diteruskan melalui sistem nasional jika dianggap perlu.

Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

dan anggota masyarakat sipil dapat mengirimkan laporan dan rekomendasi.

¹⁴ UPR adalah tinjauan empat tahunan atas catatan hak asasi manusia suatu negara, di mana negara lain, lembaga hak asasi manusia nasional,

LSM yang kredibel akan membuat rekomendasi tentang kebijakan dan perundang-undangan, yang didukung oleh penelitian dan analisis, yang dapat membantu anggota parlemen saat mereka menjalankan peran mereka dalam meneliti dan mengembangkan kebijakan.

Kemitraan efektif yang dikembangkan pada kampanye khusus antara anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat menekan pemerintah untuk bertindak atas masalah yang menjadi perhatian bersama. Masyarakat sipil harus dipandang sebagai sumber daya sekaligus mitra penting dalam upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan KBB.

Contoh jaringan LSM yang efektif adalah Platform Eropa melawan Intoleransi dan Diskriminasi Keagamaan

Contoh jaringan LSM yang efektif adalah Platform Eropa melawan Intoleransi dan Diskriminasi Keagamaan (European Platform against Religious Intolerance and Discrimination/EPRID), yang berupaya memperkuat kebijakan dan praktek Uni Eropa tentang KBB melalui keterlibatan dengan lembaga-lembaga Eropa. Pada Juni 2018, EPRID meluncurkan kampanye #ForBDefender (pembela KBB), yang terinspirasi oleh diskusi tingkat Uni Eropa tentang bagaimana Pedoman Uni Eropa terkait KBB dapat diterapkan secara lebih baik. Gerakan media sosial menyeru orang-orang dari semua agama dan tidak beragama dengan menyatakan: "Percaya atau tidak, ini Hak saya!"; hal ini justru meningkatkan kesadaran tentang KBB secara global dan berdiri terikat dalam solidaritas dengan para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Media

Media penting untuk mempengaruhi agenda pemerintah dan opini publik, serta meningkatkan kesadaran. Media lokal itu kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang KBB di komunitas atau wilayah Anda, sementara media nasional kemungkinan besar akan menarik perhatian pemerintah, menempatkan suatu masalah di bawah sorotan nasional, dan pada akhirnya menggembleng media internasional.

Anggota parlemen dapat mengikat KBB dalam pekerjaan mereka melalui keterlibatan dengan media yang meliputi cara-cara berikut:

- Menerbitkan siaran pers;
- Menulis artikel atau blog untuk bagian opini di koran;
- Menulis Surat Bersama untuk Editor; dan
- Menyiarkan secara langsung di media sosial, termasuk Facebook atau Twitter, di mana wartawan yang bekerja untuk media nasional dan internasional bisa mengaksesnya.

Contoh Advokasi yang Disarankan:

Membagikan pesan di media sosial untuk mendukung KBB pada 27 Oktober, Hari Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Internasional. Kunjungi situs #ForBdefender (#PembelaKBB) dan bagikan pesan yang disarankan di media sosial, misalnya:

SEMUA ORANG berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama atau berkeyakinan. Bantu untuk meningkatkan kesadaran tentang #FORB (#KBB) dan bersatu dengan orang-orang dari semua agama dan non-agama di seluruh dunia

untuk menyatakan bahwa “Percaya atau tidak, ini adalah Hak saya!” https://forb-defenders.org/take-action#FoRBdefender@IPP_FORB

Sigap dan Bersikaplah

Ambil tindakan pada Hari Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Internasional pada 27 Oktober:

- Berbagi pesan untuk mendukung KBB di media sosial;
- Mengajukan pertanyaan parlementer tentang masalah KBB;
- Ajukan debat di parlemen negara Anda tentang situasi KBB di seluruh dunia dan tanggapan pemerintah;
- Tulislah surat kepada utusan khusus atau duta besar KBB negara Anda terkait masalah yang menjadi perhatian, atau dukung pembentukan utusan khusus atau duta besar, jika belum ada;
- Bentuk atau bergabunglah dengan kelompok lintas-partai tentang KBB di parlemen Anda untuk memfokuskan kegiatan advokasi dalam jangka Panjang;
- Hubungi Sekretariat IPPFoRB untuk menerima berita terbaru terkait KBB untuk anggota parlemen.

Tautan Berguna dan Bacaan Lebih Lanjut

Tautan Berguna:

Forum-Asia: Sekretariat jaringan LSM Asia tentang Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dan aspirasi kunci untuk perubahan di kawasan, yang juga menyerukan reformasi mekanisme hak

asasi manusia regional di Asia. <https://www.forum-asia.org/>

Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN / Forum Rakyat ASEAN (ACSC / APF):

Sekelompok organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara yang menyelenggarakan kegiatan paralel selama Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. ACSC/APF memiliki keanggotaan yang sangat beragam, mulai dari organisasi yang tertarik pada hak asasi manusia hingga isu-isu seperti perdagangan dan lingkungan. Karena itu, ia memiliki mandat yang luas dan mewakili banyak suara. Badan tersebut bertujuan untuk membuka dialog dengan para pemimpin ASEAN dan memberikan ruang bagi masyarakat biasa untuk menyuarakan permasalahan mereka. <http://www.acsc-apf.org/>

CSW: CSW adalah organisasi hak asasi manusia yang mengkhususkan diri pada kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kami bekerja di lebih dari 20 negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Laporan mendalam kami tentang situasi KBB di berbagai negara ini tersedia di sini. Kami juga memiliki blog yang mengeksplorasi isu-isu terkait dengan hak asasi manusia ini: FoRB secara lengkap. <https://www.csw.org.uk/>

Platform Eropa melawan Intoleransi dan Diskriminasi Agama (EPRID):

EPRID adalah jaringan organisasi masyarakat sipil, badan keagamaan, dan individu yang beroperasi di tingkat Uni Eropa untuk bersama-sama mempromosikan KBB sebagaimana didefinisikan dalam UDHR, ICCPR, dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Kampanye #FoRBDefender EPRID mengundang orang-orang dari semua agama dan non-agama untuk mendeklarasikan: “Percaya atau tidak, itu

Hak saya!”, meningkatkan kesadaran tentang KBB secara global dan berdiri dalam solidaritas dengan para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

<http://www.eprid.eu/>

Bacaan lebih lanjut:

Masalah tematik dan laporan khusus negara oleh pemegang amanat Pelapor Khusus PBB saat ini dan sebelumnya untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan memberikan analisis mendalam tentang realisasi FoRB secara global.

Platform Pembelajaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

menyediakan sumber daya untuk membantu individu, komunitas, dan pembuat keputusan untuk mempelajari, merefleksikan, dan mempromosikan kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk semua. <http://www.forb-learning.org/>

Yayasan Kebebasan Beragama dan Bisnis

mendidik komunitas bisnis global tentang bagaimana kebebasan beragama baik untuk bisnis, mendorongnya untuk bergabung dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan penghormatan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (FoRB).

<https://religiousfreedomandbusiness.org/about>

© Copyright CSW 2018. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, photocopying, mechanical, recording and/or otherwise without the prior written permission of CSW.

As Christians, we stand with everyone facing injustice because of their religion or belief.

 @IPP_FoRB
 /ippforb
<http://ippforb.com>

 +44 (0)20 8329 0010
 @CSW_UK
 /CSWUK
csw.org.uk

PO Box 99
New Malden
Surrey, KT3 3YF
United Kingdom